

**ANALISIS PENGARUH
PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI
DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1992-2011**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**TRIAS FAJAR NOVIANTO
NIM. C2B006070**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Trias Fajar Novianto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006070

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, INVESTASI DAN ANGKATAN
KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1992-2011**

Dosen Pembimbing : Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si.

Semarang, 20 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

(Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si.)
NIP. 197508212002122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Trias Fajar Novianto
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006070
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1992-2011**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Maret 2013

Tim Peguji:

1. Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si (.....)
2. Nenik Woyanti, S.E., M.Si (.....)
3. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Trias Fajar Novianto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Maret 2013
Yang membuat pernyataan,

(Trias Fajar Novianto)
NIM: C2B006070

MOTTO

LEBIH BAIK TERLAMBAT
DARIPADA
TIDAK SAMA SEKALI

ABSTRACT

Economic growth of a region can be measured by the Gross Domestic Product (GDP). Economic growth in Central Java region during the observation period tends to be fluctuative and lower than any other economic growth in Java's other region.. This research purposed to analyse local revenue, investments (in this case, investment can be observed based on Foreign Investments and Domestic Investments) and the number of labor force against economic growth in Central Java during 1992 – 2011.

This research using double linear regression model and Ordinary Least Square (OLS) method to analyze data.. This research using time series data, start from 1992 until 2011.

Research methods using multiple regression analysis approach, which is using 20 years periodical data. The result of data analysis indicate that local revenue, foreign investments and labor force are likely to give positive and significant effect towards GDP in Central Java. Based on F Test's result under reliability rate of 95 %, F calculation determined in the amount of 41.67768 under probabability values 0,0000. It means that the previous variable (local revenue, foreign investments, and labor force) simultaneously affects the GDP in Central Java region.

Keywords : local revenue, foreign investments, domestic investments, labor force

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan cenderung fluktuatif dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, Investasi (dalam penelitian ini investasi dilihat dari PMA dan PMDN) dan Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 1992-2011.

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana atau Ordinary Least Squares (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder dalam rentang waktu selama 20 tahun, yaitu dari 1992 – 2011.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa PAD, PMA dan Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji F pada tingkat kepercayaan 95 persen diperoleh F-hitung sebesar 41.67768 dengan nilai probabilitas 0,0000 berarti variabel PAD, PMA, PMDN dan Angkatan Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : PAD, PMA, PMDN, Angkatan Kerja

KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji syukur kehadirat Tuhan YME atas anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011”, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu rasa terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, nasehat, pengarahan dan saran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menjalani studi di Universitas Diponegoro
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah serta Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan berupa data dan referensi yang bermanfaat.
7. Kedua orang tua serta keluarga besar atas perlindungan, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan tiada henti.
8. Adelia Budyawati atas motivasinya, Pangeran Diponegoro atas perjuangannya, Chuck Norris dan Arnold Schwarzenegger atas inspirasinya.
9. Teman-teman Jurusan IESP 2006, kawan-kawan Gmni FEB UNDIP, Keluarga Naga dan semua teman-teman yang belum bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas kenangan dan suka-cita yang diberikan selama sekian tahun.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 20 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINIALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.1 Kegunaan Penelitian	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
Bab II Telaah Pustaka	18
2.1 Landasan Teori.....	18

	Halaman
2.1.1 Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.2 Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	19
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik.....	21
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Neoklasik	25
2.1.5 Teori Pertumbuhan Baru (<i>New Growth Theory</i>).....	26
2.1.6 Investasi dan Pertumbuhan PDRB	27
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan PDRB.....	31
2.1.8 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan PDRB.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Hipotesis Penelitian	44
Bab III Metode Penelitian	45
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.1.1 Variabel Penelitian	45
3.1.2 Definisi Operasional	45
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.4 Metode Analisis	48
3.5 Pengujian Hipotesis	49
3.5.1 Uji Normalitas.....	49

	Halaman
3.5.2 Uji Multikolinearitas	49
3.5.3 Uji Autokorelasi	50
3.5.4 Uji Heterokedastisitas	51
3.6 Uji Signifikansi	52
3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)	52
3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	53
3.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	54
Bab IV Hasil dan Pembahasan	56
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	56
4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah	56
4.1.2 Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah	57
4.1.3 Perkembangan PAD Provinsi Jawa Tengah	59
4.1.4 Perkembangan Investasi Provinsi Jawa Tengah	60
4.1.5 Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah	63
4.2 Hasil dan Pembahasan	64
4.2.1 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	64
4.2.2 Uji Stastistik	68
4.3 Interpretasi dan Pembahasan	70
Bab V Penutup	74
5.1 Kesimpulan	74

	Halaman
5.2 Keterbatasan	74
5.3 Saran	75
Daftar Pustaka	79
Lampiran	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Produk Domestic Bruto Per Kapita Indonesia Tahun 1992-2011	4
Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Kostan 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	7
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Kostan 2000 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011	8
Tabel 1.4 Rekappitulasi Realisasi dan Laju Pertumbuhan Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2011	10
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Pendetapan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2011	11
Tabel 1.6 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	13
Tabel 1.7 Jumlah dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2011	13
Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Uji White	66
Tabel 4.2 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	67
Tabel 4.3 Uji <i>Auxiliary Regressions</i>	67
Tabel 4.4 Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah 1992-2011	58
Gambar 4.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 1992-2011	60
Gambar 4.3 Realisasi PMA Provinsi Jawa Tengah 1992-2011	61
Gambar 4.4 Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah 1992-2011	62
Gambar 4.3 Realisasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 1992-2011	63
Gambar 4.4 Uji Normalitas	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data	78
Lampiran B Hasil Regresi	79
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang bersifat material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik, hukum dan yang lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumberdaya berupa teknologi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2006).

Todaro dan Stephen C.Smith (2006) menyatakan bahwa proses pembangunan masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan)
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi ketersediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yaitu dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Berhasilnya suatu pembangunan oleh suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator perekonomian yang ada, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Mudrajad Kuncoro (2006), indikator pembangunan secara garis besar pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Indikator ekonomi; yang meliputi PDB perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dengan *Purchasing Power Parity*.

2. Indikator sosial; yang meliputi HDI (Human Development Index) dan PQLI (Physical Quality Life Index) atau Indeks Mutu Hidup.

Berdasar uraian tersebut, PDB perkapita termasuk dalam salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan secara terus menerus pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Pembangunan suatu negara yang mantap juga harus diikuti pembangunan ekonomi yang mantap juga. Menurut Irawan dan M. Suparmoko (1997), Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Masalah pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat dilihat pada Tabel

1.1 yang menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Produk Domestic Bruto Per Kapita
Indonesia tahun 2002-2011 (rupiah)

Tahun	PDB Per Kapita	Pertumbuhan (%)
2002	7.123.261,56	-
2003	7.353.877,04	3,24
2004	7.610.116,09	3,48
2005	7.924.894,31	4,13
2006	8.237.716,52	3,95
2007	8.631.408,43	4,78
2008	9.015.742,15	4,45
2009	9.294.167,91	3,09
2010	9.736.695,11	4,76
2011	10.219.309,82	4,96

Sumber : BPS, Statistik Indonesia

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2002-2005. Pada tahun 2006 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,18 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak yang diikuti kenaikan inflasi di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perekonomian Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Runtuhnya lembaga keuangan terbesar asal Amerika, Lehman Brother pada awal tahun 2008 yang menyebabkan resesi ekonomi global yang berdampak juga pada menurunnya PDB pada tahun 2009 dari 4,45 persen menjadi 3,09 persen.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi

selama satu periode tertentu tidak lepas dari perkembangan masing-masing sektor dan subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Teori Pertumbuhan Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi (Sadono Sukirno, 2010)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasar prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera adil santosa. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meingkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan mencukupi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memenuhi target perencanaan ekonomi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era otonomi daerah dimana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk

mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan tersebut merupakan hasil agregat dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun di sisi lain berbagai masalah dalam memaksimalkan potensi SDM, SDA dan Sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada Tabel 1.2 dapat kita lihat, PDRB Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah bila dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Walaupun dalam lima tahun terakhir nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah relatif stabil dan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur, bahkan masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat meskipun telah dimekarkan menjadi provinsi baru, yaitu Provinsi Banten. Ini terlihat bahwa pada dua tahun terakhir (tahun 2010 dan tahun 2011) kenaikan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah sangat lambat bila dibandingkan dengan nilai kenaikan PDRB Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Perbandingan kenaikan nilai PDRB ke dua provinsi tersebut hampir dua kali lipat dari kenaikan PDRB Jawa Tengah. Sedang Provinsi DIY dan Provinsi Banten masih kalah dari Provinsi Jawa Tengah, mengingat kedua provinsi tersebut luas wilayahnya lebih kecil. Posisi tertinggi ditempati Provinsi DKI Jakarta, pada

tahun 2011 yaitu sebesar 422.287.711,71 juta rupiah. Selanjutnya diikuti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 359.355.341,84 juta rupiah dan 342.522.845,47 juta rupiah pada tahun 2011.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2007-2011 (juta rupiah)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
DKI Jakarta	332.971.254,83	353.723.390,53	371.469.499,10	395.664.497,61	422.287.711,71
Jawa Barat	274.180.307,83	291.205.836,70	303.405.250,51	321.875.841,47	342.522.845,23
Jawa Tengah	159.110.253,76	168.034.483,29	176.673.456,57	186.995.480,65	198.226.349,47
DIY	18.291.511,71	19.212.481,03	20.064.256,65	21.042.267,31	22.185.395,24
Jawa Timur	287.814.183,91	305.538.686,62	320.861.168,91	342.280.765,51	359.355.341,84
Banten	65.046.775,77	79.699.684,03	83.440.214,37	88.393.769,65	94.222.360,35

Sumber : BPS, Statistik Indonesia

Dari tabel 1.2 tentang PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi di Pulau Jawa 2007-2011 maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan tahun 2000 PDRB per Provinsi pada tabel 1.3. Dari sekian juta rupiah peningkatan PDRB Provinsi Jawa Tengah, hanya memberikan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,63 persen dari rata-rata lima tahun terakhir. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah hanya berada di atas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 4,81 persen. Karena selain wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kecil, jumlah penduduknya juga relatif lebih sedikit. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 6,18 persen diikuti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur yaitu 5,87 persen, 5,80 persen dan 5,78 persen. Yang menarik yaitu pada tahun 2009, dapat kita lihat laju pertumbuhan PDRB semua

provinsi mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena resesi ekonomi dunia yang berdampak pada segala aspek kegiatan ekonomi.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Koston 2000
Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2007-2011

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi					Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	2011	
DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,51	6,73	6,18
Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,09	6,41	5,87
Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,84	6,00	5,63
DIY	4,31	5,03	4,43	4,87	5,43	4,81
Jawa Timur	6,11	6,16	5,01	6,67	4,98	5,78
Banten	6,04	5,77	4,69	5,94	6,59	5,80

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, diolah

Dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini, Provinsi Jawa Tengah masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga dihadapi oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tentunya memerlukan kapital atau modal. Kapital atau modal tersebut adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal pihak asing (PMA) maupun penanaman modal oleh investor dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah.

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2002-2011 terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun, baik dilihat dari nilai realisasi investasi maupun persentasi laju investasi yang terjadi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.4.

Berdasar Tabel 1.4 terlihat tingkat pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005

PMDN mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 202,9 persen, walaupun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006 dan tahun 2007 mengalami penurunan hingga -76,4 persen pada tahun 2007. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pertumbuhan PMDN terus mengalami pertumbuhan yaitu dari 12,1 persen pada tahun 2008 hingga 66,8 persen pada tahun 2011.

Kondisi laju pertumbuhan PMA lebih berfluktuasi jika dibandingkan dengan PMDN, dengan kecenderungan laju pertumbuhan yang menurun. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 PMA mengalami peningkatan dari minus 4,9 persen menjadi 29,2 persen namun pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar minus 15,1 persen. Kenaikan laju PMA terjadi kembali pada tahun 2007 dari minus 15,1 persen menjadi 28,7 persen namun terus menurun hingga tahun 2011 sebesar minus 31,8 persen.

Berfluktuasinya realisasi PMA dan PMDN ini disebabkan karena penanaman modal persektor setiap tahunnya berbeda dan tidak secara kontinuitas. Penanaman modal yang dilakukan investor di delapan sektor ekonomi dari satu tahun ke tahun lainnya sangat tidak ada kontinuitas karena investor hanya menanam modal di sektor ekonomi yang diminatinya. Selain itu kondisi perekonomian dunia, kondisi ekonomi dan politik dalam negeri, tuntutan upah dan minimnya infrastruktur juga menyebabkan nilai PMA dan PMDN mengalami fluktuasi yang sangat mencolok tiap tahunnya.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Realisasi dan Laju Pertumbuhan Investasi
Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2011

Tahun	PMDN		PMA	
	Investasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Investasi (US \$)	Pertumbuhan (%)
2002	777.116,97	-	22.643.793	-
2003	1.062.158,55	36,6	21.517.636	-4,9
2004	1.900.000,00	78,8	47.089.721	118,8
2005	5.756.775,87	202,9	60.842.084	29,2
2006	5.067.314,48	-11,9	51.646.917	-15,1
2007	1.191.875,23	-76,4	66.509.323	28,7
2008	1.336.340,57	12,1	63.145.041	-5,0
2009	2.570.249,47	92,3	34.648.080	-45,1
2010	2.825.395,17	9,9	30.842.665	-10,9
2011	4.714.399,11	66,8	21.027.980	-31,8

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Diberlakukannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang mencakup tentang penerimaan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk pendanaan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada. Provinsi Jawa Tengah harus dapat meningkatkan penerimaannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Pada tabel 1.5 dapat dilihat penerimaan daerah melalui PAD yang digali oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2002-2011 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2002 PAD Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 1.012.918.596 ribu rupiah terus naik sampai dengan

3.715.492.586 ribu rupiah pada tahun 2011. Walaupun nilai realisasi PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun jika dilihat dari persentase pertumbuhannya, PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang sangat mencolok dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2011 pertumbuhan PAD mencapai 39,7 persen. Selama periode 2002-2011 rata-rata Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,41 persen dengan pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2011 sebesar 39,7 persen dan yang paling rendah pada tahun 2004 sebesar 3,9 persen.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2011

Tahun	Jumlah (ribu rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	1.012.918.596,00	-
2003	1.175.439.537,00	16,0
2004	1.222.384.544,00	3,9
2005	1.538.432.732,00	25,8
2006	1.902.264.211,00	23,6
2007	2.104.268.522,00	10,6
2008	2.280.436.150,00	8,3
2009	2.524.131.229,00	10,6
2010	2.757.257.742,00	9,2
2011	3.715.492.586,00	39,7

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka , diolah

Selain investasi dan penerimaan daerah, maka angkatan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat output Provinsi Jawa Tengah. Angkatan kerja yang banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak pula. Namun, menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.

Jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan tinggi dan memiliki kemampuan akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan tingkat produksi output di Provinsi Jawa Tengah.

Pada tabel 1.6 dapat kita lihat bahwa sebagian angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 36,74 persen, disusul pada sektor perdagangan sebesar 21,84 persen, sedangkan sektor keuangan menempati urutan terakhir sebesar 1,03 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah lima tahun terakhir yaitu tahun 2001-2011. Pada tahun 2008 angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 5,2 persen atau berkurang 840.400 orang dari 16.304.058 orang pada tahun 2007 menjadi 15.463.658 orang pada tahun 2008.

Jumlah angkatan kerja dari tahun 2002-2011 mengalami fluktuasi setiap tahunnya seperti dalam Tabel 1.7. Angkatan kerja terbanyak terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 16.304.058 orang dan yang paling sedikit pada tahun 2004 yaitu sebesar 14.930.097 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 1.6
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011

Sektor	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	6.147.989	5.697.121	5.864.827	5.616.529	5.376.452
Pertambangan, Listrik, Gas dan Air	163.756	155.082	147.997	136.625	108.592
Industri	2.765.644	2.703.427	2.656.673	2.815.292	3.046.724
Konstruksi	1.123.838	1.006.994	1.028.429	1.046.741	1.097.380
Perdagangan	3.417.680	3.254.982	3.462.071	3.388.450	3.402.091
Komunikasi	738.498	715.404	683.675	664.080	563.144
Keuangan	147.933	167.840	154.739	179.804	264.681
Jasa Lainnya	1.798.720	1.762.808	1.836.971	1.961.926	2.057.071
Total	16.304.058	15.463.658	15.835.382	15.809.447	15.916.135

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Tabel 1.7
Jumlah dan Pertumbuhan Angkatan Kerja
Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2011

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2002	14751088	-
2003	15196265	3,0
2004	14930097	-1,8
2005	15655303	4,9
2006	15210931	-2,8
2007	16304058	7,2
2008	15463658	-5,2
2009	15835382	2,4
2010	15809447	-0,2
2011	15916135	0,7

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh Investasi (PMA dan PMDN), Pendapatan Asli Daerah dan jumlah angkatan kerja terhadap

pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1992-2011 dengan judul :

“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1992-2011”.

1.2 Perumusan Masalah

Seperti provinsi-provinsi di Indonesia saat ini, Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Dalam jangka lima tahun, yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2011 pertumbuhan Provinsi Jawa tengah relatif stabil, namun bila dibanding provinsi lain di pulau Jawa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tergolong masih rendah yaitu di bawah empat provinsi lainnya. Hal ini tentu menjadi acuan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah masih tergolong rendah bila dilihat melalui tingkat pertumbuhan PDRB nya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Angka PAD Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun selama kurun waktu 1992-2012 selalu mengalami kenaikan namun tidak diikuti dengan pertumbuhan yang stabil.

Investasi pada hakekatnya merupakan kegiatan awal pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau dilakukan oleh kedua belah pihak. Selama kurun waktu 1992-2011 investasi di Provinsi Jawa Tengah selalu berfluktuasi baik PMA maupun PMDN.

Angkatan kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksanan dari pembangunan daerah. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah terlihat sangat berfluktuasi. Kenaikan jumlah angkatan kerja pada tahun tertentu selalu diikuti penurunan jumlah angkatan kerja.

Perlunya investasi dan peningkatan jumlah angkatan kerja sebagai akumulasi modal, serta penggalan dan pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara serius diharapkan menjadi salah satu faktor pemacu pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berdasar uraian di atas maka timbul beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh PAD, investasi dan angkatan tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh PAD, investasi dan jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi di dalam memahami pengaruh PAD, investasi dan jumlah angkatan kerja terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah tahun 1992-2011. Diuraikan secara empiris mengungkap faktor-faktor dan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi PDRB, dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan untuk dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi oleh pengambil kebijakan yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan Keterbatasan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai tolak ukur dari prestasi perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode yang lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh perubahan faktor-faktor produksi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai dari masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.

2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.
3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi).
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional.
6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional. (Jhingan, 1995)

2.1.2 Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan (Arsyad, 1999). Dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional, unsur regional atau wilayah sudah pasti dimasukkan dalam analisisnya. Wilayah yang dimaksud dapat berbentuk provinsi, kabupaten atau kota. Target pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu saja berbeda, hal ini dikarenakan potensi ekonomi di wilayah berbeda-beda sehingga kebijakan pemerintah untuk mengaturnya pun juga berbeda, disesuaikan dengan potensi di setiap wilayah.

Dalam konteks regional, kesejahteraan masyarakat tersebut diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan Mutu Dari Penduduk dan Angkatan Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah angkatan kerja, dan penambahan tersebut dapat memberbesar peningkatan produksi dan jasa.

3. Barang-Barang Modal

Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah *output*. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang.

4. Tingkat Teknologi

Teknologi merupakan cara mengolah atau menghasilkan barang dan jasa tertentu agar memiliki nilai tambah. Teknologi mempunyai hubungan dengan inovasi, yaitu penemuan baru yang telah diterapkan dalam proses produksi, seperti menemukan daerah pemasaran baru, menemukan komoditi baru, menemukan cara kerja produksi baru dan sebagainya.

5. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius dalam pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat dan sikap tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara produksi yang lebih.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik

Pada era sebelum tahun 1870 para ekonom mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting. Penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan produksi dari sisi penawaran yang tinggi, sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Namun dalam prakteknya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, pengangguran dan deflasi. Tokoh-tokoh pertumbuhan Klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus. Secara umum asumsi yang digunakan Kaum Klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full

employment, perekonomian terdiri dari dua sektor (produsen dan konsumen), tidak ada campur tangan pemerintah dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar.

2.1.3.1 Pandangan Adam Smith

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan *laissez-faire*, dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk.

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sadono Sukirno, 2010).

2.1.3.2 Pandangan David Ricardo

Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi tidak jauh berbeda dengan pendapat Adam Smith yang berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga mengungkapkan

adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam buku Sadono Sukirno (2010) yaitu :

1. Pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada tahap ini maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja.
2. Pada tahapan kedua, karena jumlah tenaga kerja diperkerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah.
3. Tahap ketiga ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini,

perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sadono Sukirno, 2010). Persamaannya adalah :

$$Y = f(K, L, R, T)$$

Y = tingkat pertumbuhan ekonomi

K = jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan

L = jumlah dan kualitas tenaga kerja yang digunakan

R = jumlah dan jenis kekayaan yang digunakan

T = tingkat teknologi yang digunakan

2.1.3.3 Pandangan Robert Malthus

Dalam teorinya, Malthus mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dimana penambahan penduduk meningkat secara deret ukur sedangkan penambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Seperti halnya David Ricardo, Malthus berbeda pendapat dengan Smith yang belum menyadari hukum hasil yang semakin berkurang, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar. Sedangkan Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah hingga menjadi dua kali lipat dalam satu generasi

sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minim atau upah subsisten (Sadono Sukirno, 2010).

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Neoklasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam rasio modal *output* dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada kebijakan fiskal dan moneter (Tarigan, 2006).

Dalam hal ini, peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang diinginkan. Namun, demikian, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengatur tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal

akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Arsyad, 1999).

Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan Neo Klasik Solow memakai fungsi agregat standar (Todaro dan Stepehen C. Smith, 2006) :

$$Y = Ae^{mt} \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(1)$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkatan tekonologi dasar

e^{mt} = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

= melambangkann elastisitas output terhadap model, yaitu persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yaitu kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro dan Stepehen C. Smith, 2006).

2.1.5 Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan

oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan bidang teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan dalam pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau endogen tapi teknologi merupakan dari proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2003).

2.1.6 Investasi dan Pertumbuhan PDRB

2.1.6.1 Definisi Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain

itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang dapat meningkatkan *output* potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan.

- a. Menurut UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Sedangkan pengertian Mosal Asing adalah :

- Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
- Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan UU ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

b. Dalam UU No. 6 tahun 1968 dan UU No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dahulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu :

- Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah “ bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
- Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang di maksud dalam UU ini dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU ini.

2.1.6.2 Hubungan Investasi dan Pertumbuhan PDRB

Peranan investasi terhadap kapasitas produksi memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan

faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi, investasi ini nantinya akan memperbesar pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara *multiplier effect*. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas harus diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi tersebut.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan PDRB

2.1.7.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Sedangkan Hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan/penggalian sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dinyatakan bahwa kepada suatu pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah setempat untuk menciptakan sumber pajak/retribusi daerah yang baru demi semakin tercapainya kemajuan suatu daerah yang semakin mantap.

Sesuai dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan dari suatu daerah dimana pengelolaannya diurus sendiri oleh rumah tangga/pemerintah daerah itu sendiri. Jenis penerimaan ini terdiri dari :
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - Dana bagi hasil
 - Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari :
- Dana darurat dari pemerintah
 - Hibah
 - Bagi hasil dari provinsi

2.1.7.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan PDRB

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sidik, 2002).

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.

2.1.8 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan PDRB

2.1.8.1 Definisi Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas, tergolong tenaga kerja.

Tenaga kerja terdiri atas 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1996).

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi disuatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat

partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja.

2.1.8.2 Hubungan Angkatan Kerja dan Pertumbuhan PDRB

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut.

Menurut Nicholson (1991) bahwa fungsi produksi suatu barang /jasa tertentu (q) adalah $Q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan produksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Psycal Product*). Apabila jumlah angkatan kerja ditambah terus menerus sedang

faktor produksi lain dipertahankan kostan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa, dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999). Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini data *time series* dalam kurun waktu tahun 1970 – 1999. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PDB, TAB, PJK dan IPJ mempengaruhi PMA dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 86,8 persen.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Sitompul, dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara”. Penelitian ini didasarkan pada besarnya pengaruh investasi, baik PMDN maupun PMA terhadap PDRB, dimana investasi tersebut juga akan menyerap sejumlah tenaga kerja sehingga menjadi produktif. Metode analisis yang digunakan adalah OLS. Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data *time series*, 1984-2005, yaitu data jumlah tenaga kerja jumlah investasi PMDN, jumlah investasi PMA di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara. Berdasar estimasi, penelitian ini menemukan bahwa PMDN,

PMA jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,39 persen.

3. Penelitian yang dilakukan Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005), dengan judul “ Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi””. Penelitian ini menggunakan metode data runtut waktu dari tahun 1998-2003 dan data *cross section* dari 26 Provinsi di Indonesia. Hasil analisis data menunjukkan selama periode penelitian ditemukan bahwa variabel PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sehingga bagaimanapun investasi (baik PMA maupun PMDN) sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya sendiri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2006), dengan judul “Analisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu””. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* selama kurun waktu 2001-2004. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu (Dispenda), BPS, Departemen Keuangan dan jurnal-jurnal serta hasil penelitian. Variabel dependen yang digunakan yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku. Variabel independen yang digunakan PAD, DAU, APBD, Derajat Otonomi Fiskal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square*. Hasil penelitiannya yaitu PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu serta pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiati (2007), dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara *Time Series* dan *Cross Section*. Data *Time Series* dari tahun 2001-2006 dan objeknya adalah 6 kabupaten/ kota di wilayah Karesidenan Semarang. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effects model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja sebagai faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Penelitian yang dilakukan Deddy Rustiono (2008), dengan judul “ Analisis Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan model regresi log linier dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($4,499 > 2,81$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak berarti secara bersama-sama variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kesit Bambang Prakosa, dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999)	Menganalisis berapa besar pengaruh produk domestic bruto, penerimaan pajak, tabungan nasional dan instensif pajak terhadap investasi asing (PMA) di Indonesia.	Metode analisis yang digunakan adalah OLS dengan data sekunder, berupa data time series tahun 1970-1999. <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : PMA • Variabel Independen : PDB, PJK, TAB, IPJ 	Dari hasil regresi hanya variabel PDB dan IPJ yang mempengaruhi variabel Dependen PMA. Nilai konstanta juga tidak signifikan.
2.	Novita Linda Sitompul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara” (2005)	Menganalisis pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara.	Metode analisis yang digunakan adalah OLS dengan data sekunder, berupa data time series tahun 1984-2005. <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi. • Variabel Independen : PMDN, PMA, tenaga kerja, kondisi perekonomian. 	PMDN, PMA jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatera Utara dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,39 persen.
3.	Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin “Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra	Menguji pengaruh investasi modal asing, investai dalam negeri, angkatan kerja dan tingkat keterbukaan eonomi Provinsi terhadap	Metode analisis yang dilakukan menggunakan dara runtut waktu dari tahun 1998-2003 dan data cross section dari 26 provinsi di Indonesia. <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : laju pertumbuhan PDRB per kapita. • Variabel Independen : 	Hasil yang didapat dari penelitaian ini adalah pertumbuhan ekonomi untuk periode tahun 1998-2003 dipengaruhi oleh PMA (X1), angkatan kerja (X3) dan ekspor netto (X5) sedangkan

	dan Pasca Otonomi)” (2005)	pertumbuhan ekonomi regional 26 provinsi di Indonesia selama periode 1998-2003.	PMA (X1), PMDN (X2), laju angkatan kerja (X3), inflasi (X4) dan ekspor netto (X5).	PMDN (X2) dan infalsi (X4) tidak mempengaruhi ekonomi regional. Tetapi untuk periode tahun 1998-2000 (pra otonomi), X1 dan X5 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional pada periode tersebut. Sedangkan pada periode tahun 2000-2003 (pasca otonomi), X4 dan X5 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pasa masa itu.
4.	Daslan Simanjuntak “Analisis Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuahn Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu” (2006)	Menganalisis pengaruh PAD, DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu selama kurun waktu 2001-2004.	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi OLS dengan data runtut waktu 2001-2004. <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi. • Variabel Independen : PAD dan DAU. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu • Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahn berjalan di

				Kabupaten Labuhan Batu.
5.	Pujiati “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal” (2007)	Mengestimasi pengaruh variabel keuangan daerah (PAD, DAU, DBH) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Semarang.	Metode analisis yang digunakan adalah GLS (<i>Generalized Least Squares</i>). <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi. • Variabel Independen : PAD, DAU, DHB dan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. • DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. • DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. • Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	Deddy Rustiono “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah di Jawa Tengah” (2008)	Mengetahui pengaruh realisasi investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi OLS dengan data runtut waktu 1985-2006. <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi • Variabel Independen : PMDN (X1), PMA (X2), tenaga kerja (X3) dan pengeluaran pemerintah (X4) 	Hasil regresi antara variabel dependen dengan independen menunjukkan nilai bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel ($4,499 > 2,81$) sehingga secara bersama-sama variabel independen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Menurut Todaro dan Smith (2006) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah:

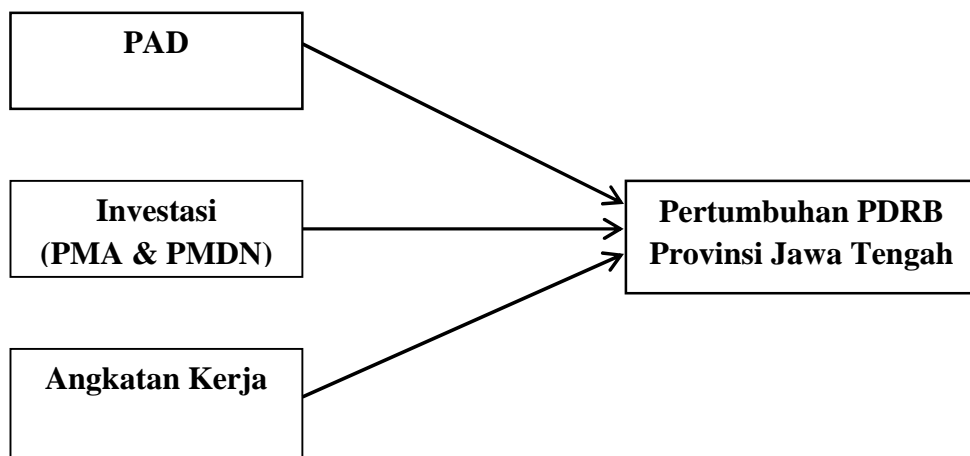
1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah,
2. Peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia,
3. Pertumbuhan/Jumlah penduduk.

Variabel PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Provinsi Jawa Tengah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD menggambarkan seberapa besar sumbangsih sumber kekayaan daerah yang potensial yang telah diolah pemerintah setempat sehingga bisa menjadi sumber penerimaan daerah.

Pengertian Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi. Oleh karena itu variabel investasi mewakili peran modal dalam menciptakan atau menambah kapasitas produksi. Ada 2 jenis investasi menurut sumbernya, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Variabel ketiga adalah angkatan kerja. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan tingkat produksi *output* di Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Diduga Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Diduga angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Diduga Pendapatan Asli Daerah, investasi dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah (Y). Sedangkan variabelnya independen dalam penelitian ini antara lain Pendaatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Angkatan Kerja (AK).

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan untuk memperjelas dan memudahkan dalam memahami penggunaan variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Definisi operasional tersebut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB adalah peningkatan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam satuan rupiah (data diambil dari BPS Jawa Tengah).

2. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Menurut pasal 6 UU No.33 tahun 2004, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain lain PAD yang sah. PAD dinyatakan dalam satuan rupiah (data diambil dari BPS Jawa Tengah).
3. Tingkat Investasi merupakan jumlah uang yang ditanamkan untuk pembangunan industri atau proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sadono Sukirno (2010) menyatakan investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi dinyatakan dalam satuan rupiah (data diambil dari BPMD Provinsi Jawa Tengah dan BPS Jawa Tengah).
4. Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/jasa secara kontinu paling sedikit satu jam dalam seminggu. Angkatan Kerja dinyatakan dalam satuan orang (data diambil dari BPS Jawa Tengah)

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini maupun internet. Jenis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 1992-2011.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 1992-2011.
3. Data realisasi dan laju pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah tahun 1992-2011.
4. Data penduduk berumur 10 tahun keatas (pada tahun 1992 – 2001) dan penduduk berumur 15 tahun keatas (pada tahun 2001-2011) yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Jawa Tengah tahun 1992-2011.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah.

Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

3.4 Metode Analisis

Metode ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan metode terkecil sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS berfungsi untuk menganalisis hubungan ketergantungan dari satu atau beberapa variabel dependen terhadap variabel lainnya, yaitu variabel independen (Gujarati, 2009). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan formula sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{PMA} + \beta_3 \text{PMDN} + \beta_4 \text{AK} + e \dots\dots\dots (3.1)$$

Kemudian persamaan di atas ditransmormasikan kedalam bentuk logaritma natural menjadi :

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnPMA} + \beta_3 \text{LnPMDN} + \beta_4 \text{LnAK} + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan PDRB diproxy dengan selisih PDRB

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PMA = Penanaman Modal Asing

PMDN = Penanaman Modal Dalam

AK	= Angkatan Kerja
β_1	= Koefisien PAD
β_2	= Koefisien PMA
β_3	= Koefisien PMDN
β_4	= Koefisien Angkatan Kerja
	= konstanta
e	= <i>error term</i>

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi hal ini digunakan uji *Jarque-Berra*, uji menggunakan distribusi probabilitas. Dimana jika probabilitasnya lebih besar daripada alpha 5 persen maka uji normalitas diterima. Justifikasi lainnya untuk uji ini adalah dengan membandingkan nilai J-B hitung dengan χ^2 tabel, apabila J-B hitung < χ^2 tabel maka residual u_t terdistribusi normal (Gujarati, 2009).

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila nilai R^2 yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinearitas (Imam Ghozali, 2005).

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model adalah sebagai berikut:

1. Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R^2 . Jika nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat multikolinearitas.
2. Melakukan regresi parsial. Menggunakan *auxiliary regression* pada masing-masing variabel independen, kemudian membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model regresi parsial. Jika nilai R^2 dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinearitas.

3.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana komponen *error* pada periode/observasi tertentu berkorelasi dengan komponen *error* pada

periode/observasi lain yang berurutan. Dengan kata lain, komponen *error* tidak *random* (Gujarati, 2003).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode Bruesch-Godfrey melalui uji LM (Lagranger Multiplier). Untuk memilih panjangnya *lag* residual yang tepat dengan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Akaike Schwarz. Berdasarkan kriteria ini, panjangnya kelambanan yang dipilih adalah ketika nilai kriteria Akaike Schwarz yang paling kecil (Widarjono, 2009: 149).

Keputusan ada tidaknya autokorelasi ditentukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- Jika nilai F^2 hitung $>$ F^2 tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbebas dari masalah autokorelasi.
- Jika nilai F^2 hitung $<$ F^2 tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heterokedasitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heterokedasitas, penaksir OLS

tidak bias tetapi tidak efisien. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heterocedasticity-consisten standart errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews 6.0. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur *equations* dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam uji ini adalah F dan Obs*Rsquared, secara khusus adalah nilai probability dari Obs*Rsquared. Dengan uji White, dibandingkan Obs*Rsquared dengan χ^2 (chi square) tabel. Jika nilai Obs*Rsquared < dari χ^2 tabel maka tidak ada heterokedasitas pada model (Gujarati, 2009).

3.6 Uji Signifikansi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2009).

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (uji *goodness of fit*). Koefisien ini nilainya antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Semakin besar nilai koefisien tersebut maka variabel-variabel independen lebih mampu menjelaskan variasi

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh model tersebut dapat dibenarkan (Gujarati, 2009). Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

1. Sebagai ukuran ketepatan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Apabila nilai R^2 semakin besar maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya, apabila semakin kecil nilai R^2 maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
2. Untuk mengukur proporsi atau presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara :

1. Menentukan hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a).
2. Menentukan *level of significance* () tertentu.

3. Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung.
4. Menarik kesimpulan.

Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Nilai F-hitung dicari dengan cara sebagai berikut:

$$F_{\text{-hit}} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)} \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah observasi

3.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan nilai statistik t, yaitu :

$$T = \beta_j / s_{\beta_j}$$

Dimana σ^2 adalah deviasi standar yang diperoleh dari $\hat{\sigma}^2 = SSE / n-k$.
Dimana n adalah jumlah observasi. K adalah jumlah parameter termasuk konstanta. Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

- Terima H_0 jika nilai t statistik $<$ nilai t tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tidak bebas.
- Terima H_1 jika nilai t statistik $>$ nilai t tabel, artinya suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tidak bebas.